



Pantau Bendera

• Sambungan Hal 1

Gumungkidul Edy Basuki, Selasa (5/8).
Edy menambahkan, sejauh ini memang belum ada aturan tertulis atau larangan resmi yang dikeluarkan oleh pihak pemerintah daerah terkait hal tersebut. Namun pihaknya tetap akan bersikap antisipatif dan berkoordinasi dengan TNI-Polri jika diemikan pelanggaran di lapangan.

"Jika nanti ada temuan, kami siap lakukan operasi bersama (sweeping) dan koordinasi tidak lanjut bila ada pengharan (atau) pemasangan bendera One Piece," ujar-nya.

Pihaknya pun mengimbau masyarakat agar ikut menjaga kekhidmatan peringatan Hari Kemerdekaan dengan tidak menyandingkan bendera nasional dengan simbol-simbol lain yang tidak resmi.

"Kami imbau agar masyarakat bersama-sama dalam peringatan HUT ke-80 RI, agar memasang dan mengibarkan bendera merah putih, itu yang utama," katanya.

Selasa (5/8), sebanyak 100 bendera Merah Putih dibagikan secara simbolis ke seluruh kapanewon di Gumungkidul pada acara kirab budaya di Kabupaten Plangrejo. Selanjutnya, bendera merah putih akan dibagikan kepada masyarakat melalui kapanewon di Bumi Handayani.

Di Kabupaten Sleman, bendera One Piece dilaporkan sempat terpasang di sebuah toko di wilayah Prambanan. Akan tetapi tidak lama bendera tersebut bangsong diturunkan oleh si pemasang karena mendapat imbauan.

"Wilayah Sleman secara umum kondusif. Tidak ada yang pasang bendera One Piece. Hanya cuma satu itu (di Prambanan) saja dan sudah clear. Sudah diturunkan dengan kesediaan si pemasang," kata Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Sleman, Samsul Bakri, Selasa (5/8).

Terkait ukuran bendera, ia mengaku tidak monitor secara detail karena hanya menerima laporan. Namun, menurut dia ukuran bendera yang terpasang kemungkinan kecil, tidak besar, karena hanya di-pasang di toko.

Disampaikan lebih lanjut oleh Samsul Bakri, bendera tersebut diopot pada awal Agustus lalu melalui upaya pendekatan persuasif maupun imbauan bahwa pemasangan bendera tersebut tidak perlu.

Samsul mengatakan, menjelang peringatan ke-80 kemerdekaan Indonesia pada 17

Agustus nanti, pihaknya fokus mengedukasi semangat nasionalisme yang dirayakan oleh masyarakat melalui beragam kegiatan positif.

Mulai dari lomba, hiburan, maupun doa bersama atau tirakatan yang semua itu bertujuan lebih menanamkan dan meningkatkan jiwa rasa nasionalisme di masyarakat. Hal itu lebih berbanding dibanding berfikir untuk memasang bendera ahimsa.

Ia meyakini warga yang memasang bendera One Piece di Prambanan bukan bermaksud untuk memberontak. Karena tidak ada indikasi sampai ke gerakan. Akan tetapi lebih karena tren yang beredar di media sosial.

"Sejauh yang kita pantau, belum ada yang mengarah ke sana (memberontak). Saya yakin warga masih komitmennya nasionalisme sangat tinggi. Belum ada indikasi sampai ke gerakan. Kemungkinan hanya tren," kata Samsul.

Didatangi aparat

Di Kulon Progo, seorang penjual bendera di daerah Wates mengaku sempat di-datangi aparat kepolisian yang melakukan pemeriksaan pada Senin (4/8). Mereka menanyakan apakah menjual bendera One Piece ke masyarakat.

Penjual itu pun menyatakan tidak menjualnya sama sekali. "Ya saya bilang apa adanya kalau memang tidak jual," jelas warga asal Jawa Barat itu.

Kasibumas Pules Kulon Progo, Iptu Sarjoko mengemukakan tidak ada pemeriksaan atau razia terhadap penjual terkait bendera One Piece. "Tidak ada petugas kami yang turun ke lapangan untuk pengecekan (bendera One Piece)," katanya saat dihubungi pada Selasa (5/8).

Menurut Sarjoko, pihaknya saat ini lebih berfokus pada upaya menjaga stabilitas keamanan wilayah dan masyarakat. Kesiapsiagaan tersebut sebagai bentuk antisipasi terhadap potensi terjadinya gangguan keamanan yang mengarah ke tindak kriminalitas.

"Antisipasi kami lakukan sampai tingkat kalurahan lewat Bhabinkamtibmas setempat," jelas Sarjoko.

Selain mengintensifkan pengamanan, edukasi dan sosialisasi ke masyarakat juga diperkuat agar mereka juga melakukan antisipasi mandiri. Sosialisasi dilakukan lewat Bhabinkamtibmas di tiap ka-

laharan.

Sarjoko pun memastikan situasi Kamtibmas di Kulon Progo sampai saat ini masih cukup kondusif. Tidak ada gangguan berarti di masyarakat menjelang Peringatan HUT ke-80 RI. "Sampai sekarang situasinya masih adem-ayem," ujarnya.

Tak ada aturan

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbang-pol) DIY, Lilik Andi Aryanoto menyampaikan bahwa hingga kini, pengharan bendera resmi seperti One Piece belum menjadi fenomena yang menonjol di DIY.

"Sampai saat ini, pantauan kami belum menunjukkan jumlah yang signifikan," ujar Lilik, Selasa (5/8).

Ia menambahkan, Kesbangpol DIY juga belum menjalin koordinasi khusus dengan Kesbangpol di tingkat kabupaten/kota untuk merespons hal ini. "Kami belum mengambil langkah koordinatif, karena memang belum ada kejadian yang menonjol," lanjutnya.

Terkait kemungkinan pelanggaran bendera One Piece, Kesbangpol DIY menegaskan belum ada kebijakan resmi yang dikeluarkan. "Belum ada larangan eksplisit. Tapi kami menyarankan masyarakat untuk mengibarkan bendera Merah Putih, terlebih di momen HUT RI," imbuhnya.

Hingga saat ini, pihak Kesbangpol DIY juga belum menjalin komunikasi lebih lanjut dengan aparat penegak hukum atau kementerian terkait dalam upaya untuk menanggapi fenomena ini secara lebih formal.

Santai saja

Wakil Wali Kota Yogyakarta, Wawan Harmawan mengimbau masyarakat untuk memonilkan atribut bendera merah putih jelang HUT ke-80 RI pada 17 Agustus 2025 mendatang.

Hal tersebut ditilikannya di tengah marak fenomena pemasangan bendera bajak laut Jolly Roger dari anime One Piece, yang bermunculan di berbagai daerah.

"Sebetulnya itu tidak harus disertusi. Tapi, harapan kami, ini kan momen 17an, merah putih saja. Itu kan hal kecil, jangan diposisikan saat momen 17an, saya rasa kurang pas," ungkapnya, Selasa (5/8).

Menurutnya, jika atribut semacam itu dipasang pada hari-hari biasa, di luar peringatan hari kemerdekaan, sejatinya tidak akan menimbulkan polemik.

Namun, ketika momentumnya berbarengan dengan perayaan HUT ke-80 RI, sudah seharusnya bendera merah

putih yang lebih ditonjolkan oleh publik.

"Kalau di hari-hari lain, ingin guyon-guyonan seperti itu, ya munggo saja. Tapi, kalau pas 17 Agustus, ya harusnya merah'putih," tandas Wakil Wali Kota.

Meski demikian, Wawan menyebut, pihaknya tidak akan membuat aturan-aturan khusus mengenai larangan pemasangan bendera bajak laut 'Topi Jerami' itu.

Ia berharap, kesadaran dengan sendirinya muncul dari benak masyarakat, bahwasanya momen 17 Agustus adalah sakral bagi segenap warga negara Indonesia.

"Ya, tapi harapannya masyarakat sendiri paham. Harusnya nasionalisme dan jiwa kebangsaan ditunculikan, bahwa kita adalah Indonesia," ungkapnya.

Kalaupun aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk protes terhadap kebijakan pemerintah, masih banyak cara lain yang bisa ditempuh tanpa mencampuri momen peringatan hari kemerdekaan.

Terhusus di Kota Yogyakarta, ia menegaskan, Pemkot senantiasa membuka diri untuk mendengarkan kritik dan keluhan dari warga masyarakat.

"Kita selalu dekat dengan masyarakat. Khusus di Kota Yoga, kita selalu mendengar masukan, mengappresiasi hal-hal baik, dan responnya selama ini cukup bagus," katanya.

Bupati Bantul, Abdul Halim Mulihs saat ditanya soal bendera One Piece mengaku tidak mengetahuinya. "Seksek, aku kok unung ngerti go. Bendera one piece itu apa? (Sebentar, saya belum tahu, Bendera one piece itu apa?)," ucap Halim.

"Ya, kalau itu soal bendera mainan itu ya enggak apa-apa yang penting masih di bawah bendera Merah Putih. Bukan bendera negara itu," tutup dia.

Wali Kota Magelang, Damar Prasetyono menanggapi santai fenomena bendera One Piece. "Ya biasa saja lah, intinya saya mau pada pemerintah pusat untuk menyikapi itu. Saya mau pemerintah pusat, kebijakannya seperti apa," ujarnya, Selasa (5/8).

Damar menyebut sejauh ini tidak ada instruksi khusus yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Magelang terkait maraknya fenomena tersebut. Ia memastikan situasi di wilayahnya tetap kondusif.

"Magelang ini aman-aman saja. Insyaallah Magelang aman, tertib, sejahtera, gemah ripah loh jinawi toto tertrem kerto raharjo," tandasnya. (adgri/me/ka/abhan)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 09 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005